



**Universitas Katolik
Parahyangan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perubahan Pendekatan Filipina yang Cenderung
Menjauhi Amerika Serikat dan Mendekati China pada
Masa Pemerintahan Duterte**

Skripsi

Oleh

Britain Rantony Mangunsong

6091901190

Bandung

2023



**Universitas Katolik
Parahyangan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Program Sarjana**

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perubahan Pendekatan Filipina yang Cenderung
Menjauhi Amerika Serikat dan Mendekati China pada
Masa Pemerintahan Duterte**

Skripsi

Oleh

Britain Rantony Mangunsong

6091901190

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP.,M.Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Britain Rantony Mangunsong
Nomor Pokok : 6091901190
Judul : Perubahan Pendekatan Filipina yang cenderung menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada (28/6/2023)
Dan dinyatakan **LULUS**

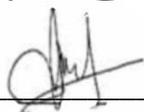
Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Britain Rantony Mangunsong
Nomor Pokok Mahasiswa : 6091901190
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Idil Syawfi, S.IP., M.Si. (20110153) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Rabu tanggal 28 June 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Perubahan Pendekatan Filipina terhadap China pada masa Pemerintahan Duterte
Judul (Bahasa Inggris) : Philippines' Change of Approach Towards China Under the Duterte Administration

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia)

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

- kurangi opini dan "seharusnya" gunakan terma-terma yang ada dalam teori.
- buat judul yang selaras dengan pertanyaan penelitian.

3. Perbaikan di Bab 1 • KP: rapihkan, dan bedakan antara buku dan artikelnya.

4. Perbaikan di Bab 2 • Tunjukkan perubahan perilaku Filipina. dari dekat ke Amerika Serikat menjadi bermasalah terkait pelanggaran HAM.
• Perubahan perilaku Filipina, dari jauh menjadi dekat dengan China dan bukan hanya ekonomi.

5. Perbaikan di Bab 3 • highlight posisi dari setiap aktor.
• tekankan perdebatan dan negosiasi antar aktor.

6. Perbaikan di Bab 4 • tunjukkan temuan berdasarkan posisi masing-masing kementerian.

7. Perbaikan di Bab 5

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 28 June 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
6/28/2023 10:19:18

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

Penguji,

adri@unpar.ac.id
6/28/2023 10:06:06

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Penguji (Pembimbing),

idil.syawfi@unpar.ac.id
6/28/2023 10:06:21

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Penguji,

nyoman@unpar.ac.id
6/28/2023 10:06:15

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Britain Rantony Mangunsong

NPM : 6091901190

Program Studi : Sarjana Hubungan Internasional

Judul : Perubahan Pendekatan Filipina yang cenderung menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juni 2023

Penulis,



Britain Rantony Mangunsong

ABSTRAK

Nama : Britain Rantony Mangunsong
NPM : 6091901190
Judul : Perubahan Pendekatan Filipina yang Cenderung Menjauhi Amerika Serikat dan Mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa birokrasi politik merupakan salah satu faktor yang membuat Duterte cenderung dekat dengan China. Pergeseran kebijakan dalam masa pemerintahan Duterte tersebut menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa pihak, sehingga munculnya perdebatan bahwa faktor apa yang dapat mempengaruhi Duterte. Di tengah sengketa teritorial antara Filipina-China yang ketegangannya semakin memanas dengan eskalasi tekanan China dikawasan tersebut menjadi alasan mengapa Filipina seharusnya dapat lebih tegas dalam menanggapi China. Namun, selama masa pemerintahan Duterte, justru Filipina melakukan berbagai upaya untuk dekat dengan China. Dari hal tersebut muncul pertanyaan penelitian yaitu “Mengapa Filipina di bawah pemerintahan Duterte cenderung memiliki hubungan diplomatik yang lebih condong ke China dibandingkan dengan Amerika meskipun masih berjalannya sengketa Laut China Selatan?”. Dalam menjawab pertanyaan penelitian itu, dan melakukan Analisa penulis akan menggunakan teori Birokrasi politik Model. Melalui penelitian ini dapat ditemukan bahwa, Dinamika para aktor birokrasi berpengaruh terhadap kebijakan Duterte, yaitu dengan kelima aktor utama seperti Departemen Pertahanan, Pasukan Bersenjata Filipina yang lebih memihak ke Amerika Serikat karena kekhawatirannya terhadap China. Lalu Departemen Keuangan dan Luar Negeri yang melihat China sebagai peluang bagi kemajuan Filipina, serta posisi Kepolisian Nasional Filipina yang mempengaruhi hubungan antara AS dengan Filipina. Kemudian dari pertarungan dan perdebatan para aktor tersebut sambil mempertahankan kepentingannya masing-masing, telah membentuk suatu kebijakan yang dapat disetujui oleh Duterte.

Kata Kunci: Duterte, China, Filipina, Amerika Serikat, Birokrasi Politik, Laut China Selatan, Dinamika.

ABSTRACT

Name : Britain Rantony Mangunsong

Student ID : 6091901190

Title : The Philippines' Change of Approach by Distancing Itself from the United States and Drawing Closer towards China during Duterte Administration

This study aims to show that political bureaucracy is one of the factors that makes Duterte tend to be more closer to China than ever before. The shift in policy during Duterte's administration raised many questions for several parties, resulting in a debate about what factors could influence Duterte. In the midst of a territorial dispute between the Philippines and China, tensions are heating up with escalating Chinese pressure in the region, this should have been the reason why the Philippines should be more assertive in responding to China's threats. However, during Duterte's reign, the Philippines made various efforts to get closer to China. From that anomaly, a research question arises: "Why does the Philippines under the Duterte government tend to have diplomatic relations that are more inclined to China than America even though the South China Sea dispute is still ongoing?". In answering the research questions and conducting the analysis the author will use the theory of the political bureaucracy model. Through this research, it can be found that the dynamics of bureaucratic actors influence Duterte's policies, namely with the five main actors such as the Ministry of Defense, and the Armed Forces of the Philippines who are more pro-United States because of their concern for China. Then the Ministry of Finance and Foreign Affairs see China as an opportunity for the development of the Philippines, as well as the position of the Philippine National Police in influencing US-Philippine relations. Then from the fights and debates of these actors, while defending their respective interests, a policy has been formed that Duterte can agree on.

Keywords: Duterte, China, Philippines, United States, Bureaucratic Politics, South China Sea, Dynamics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia Nya yang telah dilimpahkan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perubahan Pendekatan Filipina yang Cenderung Menjauhi Amerika Serikat dan Mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte” sebagai syarat lulus untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Idil Syawfi, S.IP., M.Si. atas bantuan dan arahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini, lalu dosen penguji Bapak Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A. dan Bapak Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si., serta semuanya yang membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu keluarga saya tercinta “*Mangunsong Family*”, Lalu teman-teman luar biasa saya dari sirkus gembul dan ngeteh as*, serta Kantin Heri, Andalas dan Ceritera. Perjalanan bersama yang telah melewati suka duka, canda tawa yang akan saya selalu kenang dan sangat berharga bagi saya di masa kuliah bersama ini, dari hal kecil sampai besar, segala momen yang telah dilewati bersama. Saya berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bernilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik. Saya juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penelitian selanjutnya dan semoga penelitian ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat dan dijadikan sebagai referensi serta sumbangan pemikiran dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya pada pembahasan terkait pengaruh dinamika antara para aktor dalam pembuatan suatu kebijakan negara.

Bandung, Juni 2023



Penulis

DAFTAR ISI

Tanda Pengesahan Skripsi	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metodologi Penelitian	19

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7 Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
PERUBAHAN PERILAKU FILIPINA TERHADAP CHINA DI TENGAH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN	23
2.1 Hubungan Kerjasama sektor pertahanan antara Amerika Serikat dengan Filipina	24
2.2 Kemenangan Filipina terhadap China dalam PCA 2016	27
2.3 Eskalasi Tekanan dan Ancaman China di kawasan Filipina.....	30
2.4 Kedekatan Filipina dengan China pada masa pemerintahan Duterte.....	36
2.5 Tuduhan Pelanggaran HAM terhadap Duterte.....	41
Bab III	43
PENGARUH BIROKRASI PEMERINTAHAN FILIPINA DALAM TRANSISI KEBIJAKAN FILIPINA YANG LEBIH DEKAT KE CHINA ..	43
3.1 Aktor yang terlibat dalam pembentukkan Kebijakan Pro-China	44
3.2 Faktor yang mempengaruhi posisi masing-masing aktor dalam pembuatan Kebijakan	49
3.2.1. Department of Foreign Affairs (DFA)	50
3.2.2. Department of Finance (DOF)	52
3.2.3. Department of National Defense (DND) dan Armed Forces of the Philippines (AFP).....	54
3.2.4. Philippine National Police (PNP)	55

3.3 Dinamika dan Posisi Setiap Aktor dalam proses pembentukan Kebijakan	56
3.3.1. Lembaga Pemerintahan Filipina yang Pro-Amerika Serikat	58
3.3.1.1. Posisi DND dalam hubungannya dengan Amerika Serikat	59
3.3.1.2. Posisi AFP dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.....	62
3.3.2. Lembaga Pemerintahan Filipina yang Pro-China	65
3.3.2.1. Posisi DFA dalam hubungannya dengan China.....	66
3.3.2.2. Posisi DOF dalam hubungannya dengan China.....	69
3.3.3. PNP dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan Duterte.....	72
Bab IV	77
KESIMPULAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 - Grafik komoditas impor utama filipina pada tahun 2016 dan 2015..... 70

DAFTAR SINGKATAN

AFP	: Armed Forces of the Philippines
AS	: Amerika Serikat
BRI	: Belt and Road Initiative
DFA	: Department of Foreign Affairs
DND	: Department of National Defense
DOF	: Department of Finance
EDCA	: Enhanced Defense Cooperation Agreement
JDA	: Joint Development Agreement
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LCS	: Laut China Selatan
MDB	: Mutual Defense Board
MOU	: Memorandum of Understanding
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA	: The Permanent Court of Arbitration
PNP	: Philippine National Police
SEB	: Security Engagement Board
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea
USAID	: United States Agency for International Development
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalannya Konflik Laut China Selatan antara Filipina dengan China, isu ini telah berkembang menjadi permasalahan yang semakin rumit dan luas skalanya, dengan China yang terus menerus bersikap semena-menanya melalui tindakan klaim sepihaknya di wilayah sekitaran kawasan itu atas dasar yang tidak valid.¹ Beberapa diantara wilayah yang diklaim China meliputi kawasan cukup penting bagi Filipina sendiri. Pendekatan Filipina pun tentu berbeda-beda dengan pergantian kepemimpinan negaranya dengan sejalanannya konflik Filipina terhadap China ini berlangsung. Namun setelah berbagai macam pendekatan yang telah dilakukan oleh Filipina dalam upaya menghadapi klaim-klaim sepihak China, dapat dilihat jelas bahwa semakin lama konflik ini berlanjut semakin meningkat juga tekanan dan ancaman yang China lakukan di kawasan tersebut.²

Melihat hal tersebut tentu Filipina tidak dapat diam saja, sehingga terdapatnya beberapa faktor yang mana mendukung Filipina untuk menjauhi dan menyerang China, dengan mengandalkan aliansinya untuk menghadapi China. Hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Filipina, yang mana telah menjalin kerjasama cukup erat dalam bidang keamanan dan pertahanan. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di

¹ Thea Fathanah Arbar, "Laut China Selatan Panas Lagi, Filipina Ngamuk Ke China," CNBC Indonesia, October 1, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211001140653-4-280708/laut-china-selatan-panas-lagi-Filipina-ngamuk-ke-china>.

² Ibid.

kawasan Asia Pasifik, dan salah satu isu keamanan yang paling menonjol dalam hubungan Amerika Serikat dan Filipina saat ini adalah sengketa maritim di LCS.³ Dengan pelanggaran yang telah China lakukan terkait klaim sebagian besar wilayah tersebut, termasuk sebagian wilayah yang sebenarnya menjadi wilayah ekonomi eksklusif Filipina itu sendiri. Sebagai negara yang telah lama memiliki hubungan kerjasama dengan Filipina, Amerika Serikat telah memberikan dukungan kuat kepada Filipina dalam menghadapi sengketa ini terutama dari segi keamanan dan pertahanan.⁴

Dapat diketahuinya juga bahwa sejalanannya sengketa ini berlangsung, terdapatnya eskalasi tekanan beserta ancaman China di kawasan tersebut, Filipina telah mencoba berbagai upaya dalam menghadapi klaim China, termasuk dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2013. Sekitar 3 Tahun setelah pengajuan kasus tersebut oleh Filipina, pada tahun 2016 Pihak Pengadilan Arbitrase mengeluarkan keputusan akhirnya mengenai kasus Laut China Selatan.⁵ Dalam keputusan yang tertera dijelaskan bahwa Filipina telah memenangkan kasus ini karena didukung argumennya yang sah, dengan menjelaskan bahwa klaim "nine dash line" China atas sebagian besar wilayah laut tersebut tidak valid berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dengan argumen China terkait *nine dash line* tersebut didasari oleh sebatas garis

³ Sebastian Strangio, "Kamala Harris Says US Commitment to Philippines 'Unwavering,'" [thediplomat.com](https://thediplomat.com/2022/11/kamala-harris-says-us-commitment-to-philippines-unwavering/), November 22, 2022, <https://thediplomat.com/2022/11/kamala-harris-says-us-commitment-to-philippines-unwavering/>.

⁴ Bruce Vaughn, "U.S. Strategic and Defense Relationships in the Asia-Pacific Region," CSR Report for Congress, January 22, 2007, 22.

⁵ "PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (the Republic of the Philippines v. the People's Republic of China) | PCA-CPA," [pca-cpa.org](https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/), 2016, <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>.

imajiner historisnya saja. Oleh karena itu China dianggap telah melanggar hak kedaulatan Filipina dengan mencegah nelayan Filipina mengakses perairan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina sendiri.⁶

Salah satu Faktor lainnya yang menjadi alasan mengapa Filipina seharusnya mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap China adalah sikap China yang semakin agresif di wilayah Filipina. hal ini ditunjukkan kepada kasus Scarborough Shoal, yang mana China telah membuat pangkalan militer tanpa ada perjanjian dan izin terhadap Filipina di wilayah Filipina sendiri dan masih juga banyak hal lainnya yang dapat memicu meningkatnya ketegangan sengketa LCS ini dengan China yang selalu menginisiasi agresinya terlebih dahulu.⁷

1.2 Identifikasi Masalah

Pada masa pemerintahan Duterte, Filipina terkesan mengesampingkan aliansi nya seperti AS dan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Filipina di bawah Duterte yang lebih memihak terhadap China dibandingkan dengan negara lain termasuk AS yang mana merupakan aliansi yang diandalkannya dalam menghadapi Sengketa ini. Dengan meningkatnya ketegangan antara Filipina dengan China, sudah seharusnya Filipina mengambil tindakan yang tegas untuk dapat menunjukkan kepada China bahwa Filipina tidak akan diam saja apabila China terus menekannya, namun kenyataannya pada masa pemerintahan Duterte yang terjadi justru sebaliknya. Dibalik segala alasan untuk

⁶ Ibid.

⁷ Thea Fathanah Arbar, "Laut China Selatan Panas Lagi, Filipina Ngamuk Ke China," CNBC Indonesia, October 1, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211001140653-4-280708/laut-china-selatan-panas-lagi-Filipina-ngamuk-ke-china>.

menjauhi China, pada saat pemerintahannya, Duterte mengambil tindakan yang cukup berubah drastis dari posisi Filipina sebelumnya, hal yang dimaksud adalah posisi atau *stance* Filipina di bawah pemerintahan Duterte yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan China yang mana merupakan negara yang selama ini menimbulkan masalah di kawasannya cukup lama. Melalui hal itu muncul pertanyaan seperti “Mengapa dengan ketegangan antara kedua negara tersebut, hubungan diplomatik oleh Filipina dengan China justru lebih dekat? dan yang menginisiasi hubungan tersebut adalah Filipina sendiri, hal ini berujung dengan Duterte pada masa-masa akhir jabatannya yang menyatakan bahwa tindakan transisi posisi ini merupakan sebuah kegagalan, dikarenakan masih berjalannya isu LCS sehingga masih menempatkan Filipina diujung tanduk dalam menanggapi sikap China yang semakin semena-mena.”⁸

Setelah putusan yang diberikan oleh PCA terkait sengketa LCS itu, terdapat beberapa kejanggalan pada masa tersebut bagi Filipina sendiri, terutama pada saat masa pemerintahannya berganti dari Presiden Benigno Aquino ke masa pemerintahan Duterte.⁹ yang mana pada masa pemerintahan Benigno Aquino, ia berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk dapat menghadapi China atas kasus klaim-klaim yang tidak valid di kawasan LCS tersebut, termasuk dengan menggunakan cara “*balancing*”, namun di masa pemerintahan Duterte, tiba-tiba ia memutuskan untuk mengesampingkan berbagai macam kebijakan luar

⁸ Derek Grossman, “Duterte’s Dalliance with China Is Over,” www.rand.org, November 2, 2021, <https://www.rand.org/blog/2021/11/dutertes-dalliance-with-china-is-over.html>.

⁹ Yen Nee Lee, “Philippine President Duterte’s China Pivot Hasn’t Reduced Tensions in the South China Sea,” CNBC, December 27, 2021, <https://www.cnbc.com/2021/12/27/philippine-president-dutertes-china-pivot-hasnt-reduced-south-china-sea-tensions.html>.

negeri Filipina yang mana mengandalkan aliansinya seperti hubungan bilateralnya dengan AS, dan berpindah posisi ke pihak China dengan alasan tertentu.¹⁰ Lebih dari lima tahun kemudian setelah Duterte menjadi Presiden Filipina, sikap ramah Beijing Presiden Filipina Rodrigo Duterte belum sama sekali menjinakkan ketegasan China di Laut China Selatan yang disengketakan dan pemimpin Filipina berikutnya harus lebih berani dalam menentang Beijing. Duterte dengan sengaja ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Beijing dan menyatakan bahwa dia bersedia mengesampingkan isu teritorial negaranya dengan China di Laut China Selatan.¹¹ China dan tetangganya di Asia Tenggara termasuk Filipina telah terlibat dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan selama beberapa dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, China membangun pulau buatan di laut, sementara armada penangkap ikan dan kapal militer maritim China menyerbu wilayah yang secara internasional diakui sebagai milik negara lain.

Selama pemerintahan Duterte, Filipina menjalankan hubungan yang jauh lebih erat dari pemerintahan sebelumnya dengan China, yang disebut sebagai "*China Pivot*". Hal ini menandai perubahan signifikan dalam keselarasan tradisional Filipina dengan Amerika Serikat dan aliansinya di wilayah tersebut, dan didorong oleh kombinasi faktor ekonomi dan strategis. Secara ekonomi, Filipina berusaha memanfaatkan kekuatan ekonomi dan investasi China yang tumbuh di wilayah tersebut, sebagai bagian dari Belt and Road Initiative China (BRI). Duterte berusaha untuk menarik investasi dan perdagangan China untuk mendukung rencana infrastruktur dan pembangunannya yang ambisius untuk

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Filipina. Pada tahun 2016, China mengambil alih Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar kedua Filipina, dan investasi China di negara tersebut telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir.¹²

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada isu Laut China Selatan pada saat Filipina mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) sampai keluarnya putusan PCA yang membawa dampak kepada Dinamika antara China, AS dan Filipina yaitu di kisaran tahun 2013 sampai 2021. Pada cakupan waktu tersebut juga, terjadinya pergantian masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino ke masa pemerintahan Duterte, yang mana di masa pemerintahan Duterte memutuskan untuk mengesampingkan berbagai macam kebijakan luar negeri Filipina dengan AS, dan berpindah posisi ke pihak China dengan alasan tertentu. Oleh karena itu terlihat bahwa terjadinya perubahan pendekatan Filipina terhadap China, berbeda dengan pendahulunya yang mengambil tindakan tegas dalam menanggapi isu teritorialnya itu dengan China, pada masa pemerintahan Duterte, ia berupaya untuk lebih mendekatkan negaranya dengan China. Pergeseran kebijakan yang sangat berbeda itu bisa dilihat melalui beberapa faktor atau pandangan, namun pada penelitian ini lebih berfokus pada beberapa aktor utama birokrasi dalam Filipina, yang dinamika antara aktor tersebut telah membawa dampak atas pertimbangan Duterte dalam mengambil suatu keputusan. Lembaga Pemerintahan yang menjadi sorotan utama adalah aktor yang berperan signifikan

¹² Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, "Belt and Road Primer," ph.china-embassy.gov.cn, April 11, 2019, http://ph.china-embassy.gov.cn/eng/sgdt/201904/t20190411_1182334.htm.

dalam hubungan Filipina dengan AS dan China, seperti Departemen pertahanan Nasional Filipina, Angkatan Bersenjata Filipina, Departemen Keuangan Filipina dan yang terakhir Departemen Luar Negeri Filipina, dan Polisi Nasional Filipina.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan ini, terdapatnya pertanyaan penelitian yaitu **Mengapa Filipina cenderung menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membangun argumen sebagai suatu eksplanasi alternatif dengan menjelaskan bagaimana Dinamika antara para aktor Birokrasi dalam proses pembuatan kebijakan dapat mempengaruhi keputusan Duterte dalam mengambil tindakan Filipina, yang nantinya disahkan menjadi Kebijakan Filipina dalam menanggapi hubungannya dengan AS dan China.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan teori-teori dan konsep yang sudah dipelajari serta pahami selama di perkuliahan terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini yaitu alasan dibalik kebijakan Duterte yang lebih memilih China dibandingkan dengan Amerika. Kegunaan bagi para

pembaca adalah semoga hasil dari penelitian ini dapat dipertimbangkan menjadi salah satu referensi kedepannya.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membantu analisis serta memperdalam penelitian mengenai alasan mengapa Duterte memilih untuk lebih mendekatkan Filipina dengan China di tengah sengketa teritorial lautnya. Penulis pun merujuk pada beberapa literatur penelitian berisikan berbagai pandangan dari para ahli dengan topik serupa diteliti oleh penulis yang meliputi perdebatan terkait kebijakan luar negeri Filipina di masa pemerintahan Duterte yang lebih memihak kepada China dibandingkan dengan aliansi lamanya seperti AS bahkan di tengah konflik Laut China Selatan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang mana Penulis membagi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan Duterte tersebut menjadi dua kemungkinan yaitu faktor Internal dan Eksternal.

Pandangan Pertama, Renato Cruz De Castro berargumen bahwa dalam Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Duterte, meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) memberikan penghargaan kepada Filipina, Kebijakan Presiden Duterte diarahkan untuk menghidupkan kembali kebijakan keseimbangan di Tiongkok, berbeda dengan strategi penyeimbangan Presiden Aquino yang melakukan sebaliknya.¹³ Dalam penelitiannya ini Renato menunjukkan argumen bahwa daripada mengandalkan AS, Filipina dapat

¹³ Renato Cruz De Castro, "The Duterte Administration's Foreign Policy: Unravelling the Aquino Administration's Balancing Agenda on an Emergent China," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35, no. 3 (December 2016):.... <https://doi.org/10.1177/186810341603500307>.

memanfaatkan China dalam beberapa proyek infrastruktur dan investasi besar di Filipina dengan menggunakan negosiasi bilateral dengan Beijing itu.

Pandangan dari Renato juga sejalan dengan buku yang berasal dari tulisan Mark Bryan F. Manantan ini menjelaskan tentang terjadinya Transisi posisi Filipina ke pihak China setelah kemenangannya di *Permanent Court of Arbitration* (PCA) atas klaim maritim di Laut China Selatan.¹⁴ Meskipun demikian, Filipina menegaskan hak kedaulatannya secara de jure, yang ditegaskan kembali oleh keputusan PCA, Presiden Filipina Rodrigo Duterte justru lebih memilih untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan China, karena melihat peluang kerjasamanya dengan China yang dapat mendorong perekonomian Filipina kedepannya. Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan Manila yang juga telah menegaskan kembali nilai strategisnya dalam aliansi AS dengan Filipina bahwa kebijakan Filipina-China mencerminkan taktik diplomatik dan ekonomi jangka pendek daripada yang bertahan lama.

Begitu juga Pandangan selanjutnya berasal dari Henelito A. Sevilla, Jr dalam bukunya menjelaskan terkait klaim China yang “tak tergoyahkan” atas Laut China Selatan, Henelito berargumen bahwa Duterte telah mengakui bahwa Filipina tidak memiliki peluang dengan tentara China. Dia harus secara strategis memilih “tindakan” apa yang dapat memberi lebih banyak ruang untuk meredakan ketegangan kasus ini dimana China terus berkeliaran di pulau-pulau yang

¹⁴ Mark Bryan F. Manantan, “Pivot toward China: A Critical Analysis of the Philippines’ Policy Shift on the South China Sea Disputes,” *Asian Politics & Policy* 11, no. 4 (October 2019): 657 <https://doi.org/10.1111/aspp.12498>.

disengketakan di Laut China Selatan ini.¹⁵ Dengan kata lain, Duterte harus menunggu waktu yang tepat untuk membahas masalah kedaulatan dengan China. “Waktu” yang tepat tersebut bisa menjadi inti dari keputusan Duterte. Melalui hal ini dapat diketahui bahwa pemerintahan Duterte berarti harus merencanakan kebijakan yang solutif dalam waktu sesingkat mungkin agar dapat menghindari semakin meningkatnya tekanan China itu. Beberapa pendapat sebelumnya yang telah disampaikan oleh para ahli merupakan faktor-faktor Eksternal yang menjadi alasan mengapa, sedangkan tentunya apabila ada faktor Eksternal pasti terdapat juga faktor-faktor Internal yang dapat mempengaruhi Presiden Duterte terhadap pembentukan kebijakannya, oleh karena itu penulis juga mencantumkan pandangan lain yang membahas terkait faktor Internal tersebut melalui argumen para ahli.

Argumen pertama tentang faktor Internal yang mempengaruhi Duterte ini juga berasal dari ahli yang sebelumnya telah penulis cantumkan dalam bagian ini, yaitu Renato Cruz de Castro, yang menjelaskan pandangannya terhadap tindakan Presiden Duterte dalam membatalkan agenda geopolitik Presiden Aquino untuk menyeimbangkan klaim sepihak China di Laut China Selatan.¹⁶ Renato dalam bukunya ini berpendapat bahwa, pemerintahan saat itu yang mana di bawah Duterte, percaya bahwa kebijakan yang “bersahabat” dengan China ini layak untuk dilakukan. Namun, dengan memenuhi tuntutan kekuatan ekspansionis,

¹⁵ Henelito A. Sevilla, Jr., “The Philippines’ Foreign Policy Direction: An Assessment of the First Year of President Duterte,” *Journal of South Asian Studies* 6, no. 3 (March 16, 2019), <https://doi.org/10.33687/jsas.006.03.2558>.

¹⁶ Renato Cruz de Castro, “Explaining the Duterte Administration’s Appeasement Policy on China: The Power of Fear,” *Asian Affairs: An American Review* 45, no. 3-4 (October 2, 2018): 22, <https://doi.org/10.1080/00927678.2019.1589664>.

Filipina menjadi terlibat dalam strategi ekspansi maritim jangka panjang China yang bertujuan untuk mendorong Amerika Serikat keluar dari Asia Timur. Ini pasti akan mengganggu keseimbangan kekuatan saat ini di wilayah tersebut. Memfasilitasi upaya China untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya di Pasifik barat akan berdampak buruk terhadap kepentingan teritorial dan strategis dan ekonomi jangka panjang Filipina sebagai negara kepulauan, maka dari itu pengaruh internal seperti masukan sekretaris keuangan Filipina itu dapat menjadi pertimbangan utama bagi Duterte dalam mengesahkan pembentukan kebijakan yang pro China tersebut.

Terdapat juga pandangan oleh Richard Javad Heydarian yang membahas terkait Politik dalam negeri telah memainkan peran penting dalam perubahan dramatis dan munculnya individu yang tegas seperti Duterte menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri menjadi lebih personalistik, karena dia berusaha menyusun kebijakan luar negeri Filipina menurut pandangannya sendiri.¹⁷ Namun, apakah nantinya Duterte akan berhasil menerjemahkan preferensi pribadinya ke dalam perubahan kebijakan yang dapat bertahan lama. Penelitian ini juga berpendapat bahwa salah satu alasan mengapa terjadinya transisi kebijakan drastis ini dikaitkan dengan kerasnya pandangan Duterte untuk harus bisa lebih menjadi negara yang independen dengan cara mengurangi ketergantungan negaranya terhadap AS dikarenakan mencegah terjadinya Tragedi politik kekuatan kecil bahwa kebijakan luar negeri Filipina di masa depan akan mengarah

¹⁷ Richard Javad Heydarian, "Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy," *Asian Security* 13, no. 3 (August 4, 2017): 220-236, <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354569>.

pada “bergantung” sebagian besar pada perilaku kekuatan negara besar seperti China dan AS.

Lalu Pandangan terakhir berasal dari E. Palanca dan Austin Ong yang sejalan dengan pandangan sebelumnya menyatakan bahwa, hubungan Filipina-Tiongkok dalam dua dekade terakhir ini yang telah dibentuk oleh politik dalam negeri Filipina serta diikuti dengan kekuatan pasar regional dan global.¹⁸ Investasi, pinjaman, dari China sangat dipengaruhi oleh kelancaran hubungan bilateral dengan Filipina, maka dari itu Duterte harus dapat memperlihatkan rasa antusias yang ingin memiliki hubungan lebih “bersahabat” dengan China. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa, dalam beberapa dekade terakhir, investasi keluar Filipina dapat dikatakan lebih selaras dengan motivasinya untuk meningkatkan perekonomiannya daripada politik, sejalan dengan tujuan pemerintahan Duterte yang mana untuk mendiversifikasi keterlibatan luar negerinya di luar mitra tradisional Filipina.

Berdasarkan dari perdebatan yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut, sampai saat ini masih dapat diperdebatkannya alasan dibalik mengapa atau atas pengaruh siapa Duterte sangat bersikeras atas melakukan transisi kebijakan luar negeri Filipina yang sangat dapat dikatakan sangat drastis itu dengan lebih memilih untuk mendekatkan Filipina dengan China daripada aliansi lamanya AS meskipun masih adanya sengketa teritorial di LCS. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁸ Ellen Palanca and Austin Ong, “Philippines–China Relations: Interplay between Domestic Politics and Globalization,” *The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia*, July 11, 2018, 93–122, https://doi.org/10.1007/978-981-13-0065-3_5.

Penelitian ini lebih membahas ke faktor internal dari pemerintahan Filipinanya sendiri, karena ingin mengkaji lebih dalam mengenai dinamika antara para aktor birokrasi Filipina sehingga dapat membawa pengaruhnya kepada Duterte. Sehingga dapat diteliti alasan mengapa Duterte pada akhirnya setuju untuk mengesahkan kebijakan China sentris yang sangat drastis itu baik bagi para aliansi Filipina dan juga Filipina sendiri jika dilihat dari sejarah sekaligus situasi sekarang ini dialaminya dengan China. Oleh karena itu peneliti menganalisis alasan dibelakang transisi kebijakan tersebut dari pengaruh internalnya yaitu dinamika birokrasi politik yang ada dalam pemerintahan Duterte.

Dari beberapa Jurnal yang telah dicari oleh peneliti, masih belum ada pandangan terkait pandangan dari segi birokrasi politik pemerintahan Filipina, hal ini mungkin bisa jadi dikarenakan tidak semua pemerintahan negara dapat “cocok” menggunakan sistem pemerintahan tersebut, karena sifat dari teori atau konsep tersebut yang tidak melihat dari satu aktor saja sebagai intinya, berbeda dengan konsep rasional teori yang menunjukkan pada pemikiran satu individu dalam menghasilkan keputusannya. Namun dari beberapa pandangan yang peneliti dapat, muncul beberapa faktor terkait pembahasan yang penulis sedang uji dalam analisis penelitian ini. Terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi pengaruh dalam pembuatan suatu kebijakan, terutama kebijakan yang sangat mencolok seperti kebijakan yang disahkan oleh Duterte tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menentukan suatu Kebijakan Luar Negeri tentu diperlukannya konsiderasi sangat matang agar dapat menghasilkan suatu kebijakan yang dapat membawa hasil yang sesuai dengan harapan, maka dari itu penulis menggunakan Model Birokrasi Politik, yang mana konsep ini biasanya sering dikaitkan dengan alasan mengapa negara terkadang bertindak tidak rasional.¹⁹ Model Politik Birokrasi adalah cabang dari Teori kebijakan luar negeri yang mana pendekatan untuk mempelajari proses pengambilan keputusan dalam hubungan internasional menekankan peran aktor birokrasi dalam suatu pemerintahan. Menurut model ini, aktor atau lembaga birokrasi yang berbeda dalam suatu pemerintahan dapat memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda dan bersaing untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.²⁰ Seperti yang dijelaskan oleh Allison dalam Jurnal dengan judul, *Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications* (1972), Model Politik Birokrasi menunjukkan bahwa sebuah keputusan merupakan hasil dari proses tawar-menawar di antara berbagai aktor dengan preferensi dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda.²¹

Para ahli teori politik birokrasi, termasuk Allison, secara eksplisit mengakui bahwa faktor-faktor lain, seperti kepribadian, hubungan interpersonal, dan tentunya kemampuan seorang individu dalam mengakses informasi, juga memainkan peran penting dalam proses politik birokrasi ini. Bagi para ahli teori

¹⁹ Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," *World Politics* 24, no. S1 (1972): 47, <https://doi.org/10.2307/2010559>

²⁰ Ibid.

²¹ Brent Durbin, "Bureaucratic Politics Approach | Definition & Facts," in *Encyclopædia Britannica*, 2019, <https://www.britannica.com/topic/bureaucratic-politics-approach>.

ini, dalam memahami tentang pembuatan kebijakan dapat dibaginya menjadi 3 syarat atau tahap yang penting, yakni:²²

1. Siapa aktor yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan?

Hal ini dapat dilihat di dalam sistem atau kinerja pemerintahan mana pun, pasti terdapatnya sekelompok anggota-anggota yang lebih 'senior' sehingga memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih dalam permainan kebijakan keamanan nasional. Kelompok yang dimaksud itu merupakan seorang yang memiliki posisi seperti tokoh politik utama, kepala organisasi keamanan nasional utama, termasuk intelijen, militer dan, untuk tujuan tertentu, organisasi yang mengelola alokasi anggaran dan ekonomi negara.²³ Pengidentifikasian aktor dalam suatu birokrasi ini sangat penting dalam memahami cara kerjanya pembuatan keputusan. Model ini mengakui bahwa pengambilan keputusan bukanlah proses yang linear, melainkan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan sekaligus juga pandang dikarenakan aktor tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda.²⁴ Dengan mampu mengidentifikasi aktor-aktor utama yang terlibat langsung dalam kasus utama sehingga proses pembuatan kebijakan dapat membantu menentukan dinamika kekuasaan yang sedang dimainkan, karena model ini berpendapat bahwa kekuatan relatif dari aktor yang

²² Ibid.

²³ Graham T. Allison and Morton H. Halperin, "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications," *World Politics* 24, no. S1 (1972): 47, <https://doi.org/10.2307/2010559>

²⁴ Ibid.

berbeda dalam birokrasi dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk dapat membawa pengaruhnya dalam hasil kebijakan itu.²⁵

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi posisi masing-masing aktor?

Salah satu alasannya mengapa mengidentifikasi posisi masing-masing aktor sangat penting adalah untuk membantu memprediksi dan menjelaskan hasil kebijakan. Dengan memahami motivasi dan preferensi dari setiap aktor yang terlibat, penulis dapat memprediksi dengan lebih baik kemungkinan arah tindakan yang akan diambil dan kemungkinan hasil dari proses pembuatan kebijakan.²⁶ Memahami motivasi dan preferensi dari masing-masing aktor yang terlibat, pembuat kebijakan dapat menyusun kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mungkin bisa lebih efektif atau berhasil. Selain itu, dengan mengidentifikasi lawan atau yang dapat menjadi sekutu kedepannya. Pembuat kebijakan dapat menyusun strategi dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memaksimalkan peluang keberhasilan.

Dengan itu, mengidentifikasi tujuan atau mandat dari masing-masing aktor dalam model politik birokrasi sangat penting untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan memprediksi hasil kebijakan. Ini juga dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Untuk melakukannya secara efektif, analisis harus mengidentifikasi aktor yang relevan, mengumpulkan informasi tentang

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, 48

motivasi dan preferensi mereka, serta menganalisis informasi untuk menentukan pendirian masing-masing aktor.

3. Bagaimana posisi aktor bersatu untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan pemerintah?

Salah satu faktor kunci yang menentukan kedudukan para pelaku dalam model politik birokrasi adalah kedudukan atau perannya dalam hirarki pemerintahan. aktor yang memegang posisi tingkat tinggi, seperti Presiden atau Menteri Luar Negeri, memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan kebijakan daripada mereka yang memegang posisi tingkat rendah.²⁷ Para aktor ini pastinya juga memiliki preferensi dan posisi kebijakan yang berbeda yang dibentuk oleh perbedaan dari masing-masing latar belakang, pengalaman, dan ideologi pribadi mereka.

Faktor lain yang mempengaruhi posisi aktor adalah akses mereka ke informasi dan sumber daya. aktor yang memiliki lebih banyak informasi dan sumber daya, seperti analis intelijen, mungkin memiliki pengaruh lebih besar atas keputusan kebijakan daripada mereka yang memiliki akses lebih sedikit ke sumber daya tersebut.²⁸ Mereka mungkin juga memiliki preferensi dan keyakinan kebijakan yang berbeda berdasarkan informasi yang dapat mereka akses dan kepentingan pribadi mereka sendiri.

²⁷ Ibid, 50

²⁸ Ibid.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kedudukan para aktor adalah budaya organisasi dan struktur lembaga atau departemen pemerintah tempat mereka berada. Instansi atau departemen yang berbeda mungkin memiliki kebijakan yang berbeda dalam membentuk sikap para aktornya. Misalnya, Departemen Pertahanan dapat memprioritaskan masalah keamanan nasional, sedangkan Departemen Luar Negeri dapat memprioritaskan hubungan diplomatik dengan negara lain. Untuk menggabungkan pendirian berbagai aktor ke dalam keputusan dan tindakan kebijakan, berbagai mekanisme dan proses digunakan dalam pemerintahan. Dalam “menggabungkan” pendirian tersebut para aktor harus melalui tawar-menawar, negosiasi, kompromi, dan resolusi konflik dengan sesama aktor lainnya.

Dalam bukunya, Allison menjelaskan bahwa Probabilitas keberhasilan setiap aktor dalam mempengaruhi kebijakan akhir dapat diukur melalui pada tiga hal yaitu: keunggulan, keterampilan dan kemauan aktor untuk memanfaatkan keterampilannya itu dalam menggunakan kemampuan negosiasi atau tawar-menawarnya tersebut, juga persepsi aktor lain terhadap dua elemen pertama tersebut.²⁹ Pentingnya memiliki akses atas informasi dapat memberikan keunggulan pada aktor tersebut dalam melihat secara gambaran luas sebuah masalah tersebut sekaligus mengidentifikasi opsi solutif yang tersedia, dan terakhir adalah kemampuan untuk mempengaruhi tujuan aktor lain.³⁰

²⁹ Ibid, 50

³⁰ Ibid.

Berbeda dengan model aktor rasional, yang memandang negara sebagai aktor kesatuan, model politik birokrasi menganalisis keputusan berdasarkan premis bahwa tindakan diambil oleh sejumlah entitas yang bersaing dan independen dalam negara tertentu. Masing-masing entitas yang terpisah ini membawa nilai ke dalam proses pengambilan keputusan, serta pandangannya sendiri tentang apa yang terbaik untuk kepentingan pribadi, organisasi, dan nasional. Setiap pihak berusaha untuk mencapai tujuannya, yang berarti setiap tindakan kolektif bergantung pada negosiasi yang berhasil dan tercapainya konsensus akhir antara semua aktor.³¹ Pendekatan politik birokrasi sering dikenal atau dikaitkan sebagai penjelasan mengapa negara terkadang bertindak tidak rasional.³²

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Penelitian ini bersifat deduktif, yang mana sebuah cara dalam menganalisis suatu penelitian dengan membuktikan suatu argumen atau hipotesis sang penulis melalui teori yang ada, dan kemudian merancang analisis lebih lanjut untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Metode ini diawali dengan mencari teori yang sesuai, lalu merumuskan hipotesis berdasarkan dari teori yang

³¹ “The Bureaucratic Politics Approach: Its Application, Its Limitations, and Its Strengths – CESRAN International, October 9, 2018, <https://cesran.org/the-bureaucratic-politics-approach-its-application-its-limitations-and-its-strengths.html>.

³² Ibid.

ada dan studi kasus yang menjadi pembahasan utama, selanjutnya penulis mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut.³³

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Dokumen sebagai sumber utama dalam pengumpulan data, seperti dokumen resmi pemerintahan, pernyataan resmi pemerintah melalui media seperti berita nasional dan internasional, selain itu dapat juga ditemukannya sumber dari buku dan jurnal yang valid di internet yang telah dipublikasi untuk kegunaan publik dan akademis, dan pemakaian grafik yang berasal dari data statistik peneliti lain, yang mana hal ini memungkinkan data untuk digunakan kembali dengan cara lain dari yang dimaksudkan oleh peneliti aslinya.³⁴

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah Kualitatif, oleh karena itu penulis akan menganalisis penelitian ini dengan menggunakan *logic induksi analitik* atau *analytic induction*, yang mana merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan dengan melibatkan pemeriksaan data secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, posisi dan hubungan, yang mengarah pada hipotesis yang teoretis.³⁵ Induksi analitik memungkinkan peneliti untuk bergerak melampaui deskripsi data belaka dan terlibat dalam penalaran dan interpretasi teoretis. Dengan mengikuti pendekatan sistematis dan iteratif, induksi analitik membantu memastikan ketelitian dan validitas dalam penelitian kualitatif, dan oleh karena itu juga peneliti dapat secara

³³ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 24.

³⁴ *Ibid*, 482

³⁵ *Ibid*, 567

bertahap membangun kerangka teori atau penjelasan yang memperhitungkan pola dan hubungan yang diamati.³⁶

1.7 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi ke beberapa bab, yaitu pada **Bab 1**, yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam Bab ini, mayoritas pembahasan penelitian meliputi faktor-faktor yang mendukung Filipina untuk menyerang dan menjauhi China sebagai bentuk tanggapannya atas ancaman China, namun adanya anomali dalam pemerintahan Duterte yang berkeputusan untuk mengubah kebijakan luar negerinya agar dapat menjalin hubungan kerjasama dengan China di samping permasalahannya yang masih belum selesai. Selanjutnya **Bab 2**, berisikan pembahasan lebih lanjut terkait bukti kedekatan Filipina dengan China pada masa pemerintahan Duterte, sehingga dapat semakin terlihat anomali dalam pengambilan keputusan Duterte untuk berteman dengan China, dengan mengesampingkan eskalasi ancaman China yang semakin meningkat dalam kawasan Filipina itu. Pada penelitian ini, **Bab 3** merupakan bab yang menjadi pembahasan serta analisis utama yang dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dari tulisan ini yaitu “**Mengapa Filipina cenderung menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China pada Masa Pemerintahan Duterte?**” dengan menggunakan konsep dan literatur yang dapat mendukung argumen penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, dan

³⁶ Ibid.

menjelaskan dinamika antara para aktor pada masa pemerintahan Filipina. **Bab 4**, Bab ini berisikan kesimpulan penelitian ini yang berdasarkan hasil dari data-data yang telah dijelaskan di Bab-Bab sebelumnya, sehingga melalui data serta argumen tersebut, menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian, serta masukan dan saran terkait topik dalam penelitian ini.